



KOMINFO



# LAPORAN KINERJA 2019

**Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio  
Kelas I Bandung**



Sumber Daya  
dan Perangkat Pos  
dan Informatika



# LAPORAN KINERJA 2019

**Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio**  
**Kelas I Bandung**

Jl. Pacuan Kuda No. 146 Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293  
Telp. (022) 7278484, Fax. (022) 7278382  
Email: [upt\\_bandung@postel.go.id](mailto:upt_bandung@postel.go.id)

## Ringkasan Eksekutif

**REVOLUSI** industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu *Internet of Things*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi *3D Printing*.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi antar negara dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas wilayah negara, jarak, dan waktu. Implementasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era Industry 4.0 tidak hanya memiliki potensi luar biasa dalam merombak aspek industri, bahkan juga mampu mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan tersebut telah mendorong pemanfaatan spektrum frekuensi radio semakin besar. Oleh sebab itu, dituntut peran pemerintah yang semakin besar untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Jawa Barat yang bersifat mandiri di bawah unit eselon I Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator. Sasaran kegiatan yang pertama adalah Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi terdiri dari 2 indikator. Sasaran kegiatan kedua adalah Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif terdiri dari 2 indikator.

Pada tahun 2019, capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dari sejumlah indikator kinerja tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Selisih (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.	80,00%	100,00%	20,00%
		2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.	100,00%	100,00%	0,00%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100,00%	100,00%	0,00%
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	94,00%	92,97%	-2,01%

\*Note : Selisih antara capaian (4) dan target (3).

Sasaran Kegiatan Pertama: ***"Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi"*** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. Indikator Kinerja 1: *Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.* Terdiri dari 7 (tujuh) sub indikator kinerja yaitu:**

**1.1. *Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota.***

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 16 (enam belas) kegiatan untuk observasi dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio 22 pita frekuensi yang ada di 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Realisasi pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi radio tersebut adalah 16 (enam belas) kegiatan dengan jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 20 (dua puluh) kabupaten/kota dari jumlah target kabupaten/kota termonitor sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 90.90% dari yang ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 80%.

Adapun wilayah yang tidak dilakukan monitoring dan okupansi adalah Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi. Pelaksanaan 16 (enam belas) kali kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan perhitungan okupansi penggunaan 22 (dua puluh dua) subservice spektrum frekuensi radio dan pelacakan penggunaan frekuensi ilegal yang ada di 20 (dua puluh) kabupaten/kota Propinsi Jawa Barat.

### **1.2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable.**

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable di wilayah Jawa Barat sebanyak 12 (dua belas) laporan kegiatan. Sampai dengan bulan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 12 laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap atau dengan kata lain capaiannya adalah 100.00%.

### **1.3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur.**

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 35% dari 342 ISR yang terdaftar pada data SIMF. Sampai dengan bulan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 61,11% yaitu 149 stasiun Radio Siaran FM dan 60 stasiun televisi siaran analog dengan total 209 ISR dari 342 ISR di wilayah Jawa Barat yang menjadi kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung.

### **1.4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal.**

Pada tahun anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 50% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, sementara pada program kerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 12 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 2 kali di wilayah Jawa Barat. Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 12 kali kegiatan dengan hasil pengguna frekuensi ilegal sebanyak 40 pengguna dengan rincian 35 diperingatkan dan 5 pengguna diamankan. Kemudian, kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan 2 kali kegiatan terhadap 40 pengguna frekuensi ilegal dengan hasil penindakan dalam bentuk pembinaan.

### **1.5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.**

Pada tahun anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 1 kali kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.

Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 2 kali kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi yang dilakukan di Kota Bandung pada 102 (seratus dua) perangkat telekomunikasi dengan rincian 15 tidak bersertifikat dan 87 bersertifikat.

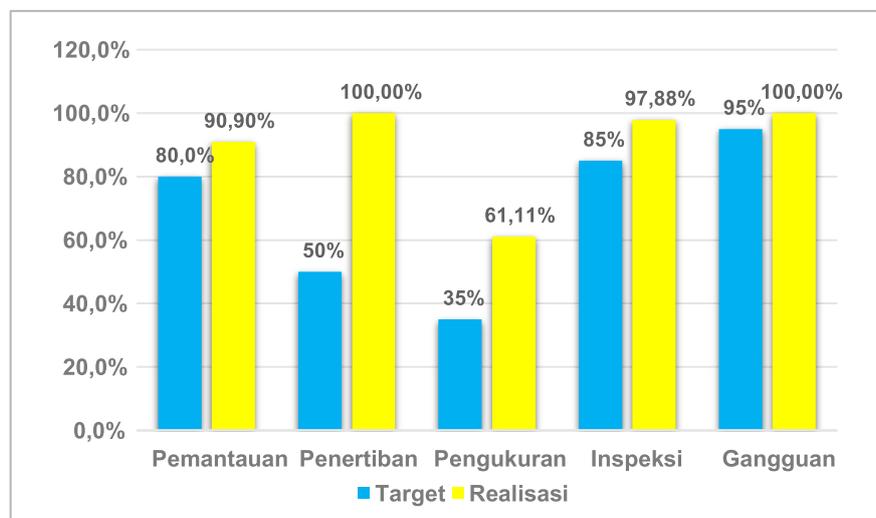
#### 1.6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR.

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ditargetkan 85% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 1465 (seribu empat ratus enam puluh lima) data sample ISR Microwave Link yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Jumlah target kegiatan inspeksi tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 10 (Sepuluh) kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2019 data yang dapat diinspeksi adalah 1465 frekuensi link yang telah ditindaklanjuti adalah 1434 Microwave Link (sesuai ISR 648 Microwave Link dan tindak lanjut pengurusan izin/penggudangan 786 Microwave Link) atau sebesar 97.88%.

#### 1.7. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio.

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Jawa Barat dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penangan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 30 aduan gangguan di tahun 2019 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi *interference* pada aduan yang sama (*clear*).

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 terhadap indikator kinerja Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT yang terbagi ke dalam kegiatan pemantauan, penertiban, pengukuran, inspeksi, dan gangguan penggunaan frekuensi radio dengan gambaran sebagai berikut:



Keterangan: Realisasai SBK Tahun 2019

**2. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.** Terdiri dari 5 (lima) subindikator kinerja, yaitu:

**2.1. 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.**

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menargetkan 83% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT. Dengan total perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur yang dimiliki sebanyak 411 (empat ratus sebelas) unit, pada posisi terakhir Desember 2019 terdapat 42 (empat puluh dua) unit yang mengalami kerusakan. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah tercapai 89.78% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 83%.

**2.2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT.**

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi Perijinan Frekuensi Radio Dinas Maritim yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 di Lapangan Parkir Mangrove Pantai Karangsong Indramayu.

**2.3. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL.**

Pada tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) kali rencana peninjauan lapangan ataupun penagihan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL. Dimana pada pelaksanaannya melibatkan pihak KPKNL dan Seksi Sarana dan Pelayanan. Sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan KPKNL Bandung dan 12 (duabelas) kegiatan dengan KPKNL yang berada di luar Bandung yaitu KPKNL Bogor, KPKNL Cirebon, KPKNL Purwakarta dan KPKNL Tasikmalaya telah selesai dilaksanakan. Terdapat 88 (delapan puluh delapan) debitur dan 16 (enam belas) diantaranya telah melunasi piutang tersebut.

**2.4. Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio**

Sepanjang tahun 2019 terdapat 1030 (seribu tiga puluh) Surat/Rincian Tagihan yang telah didistribusikan kepada seluruh klien yang berada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung.

**2.5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).**

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menetapkan target 100% terlaksananya UNAR sementara pada rencana program kerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung merencanakan 2 (dua) kali kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan

UNAR sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Tasikmalaya dan Bandung dengan total peserta 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) orang terdiri dari YD sejumlah 573, YC sejumlah 55 dan YB sejumlah 45, dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Sasaran Kegiatan Kedua: **“Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan layanan eksternal dan layanan internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang merupakan layanan eksternal sebagai bentuk pelayanan publik dan layanan administrasi sebagai bentuk layanan internal. Kegiatan ini merupakan manivestasi pelayanan Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat.

**1. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Terdiri dari 4 (empat) subindikator, yaitu:**

**1.1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku.**

Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan merupakan kegiatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, adapun kegiatan tersebut adalah:

**a. Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran**

Pada tahun 2019 program kerja yang disusun oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki komposisi anggaran dengan total sebesar Rp. 14.655.367.000,- (*empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.634.645.000,- (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan PNPB sebesar Rp. 7.020.722.000,- (*tujuh miliar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 1.368.597.000,-	59 Layanan
2	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 357.949.000,-	21 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	Rp. 3.075.008.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 584.020.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 9.269.793.000,-	1 Layanan

#### b. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah terealisasi sebesar Rp. 14.116.618.414,- (*empat belas miliar seratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah*) dari pagu Rp. 14.655.367.000,- (*empat belas miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 96.32%. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA, penambahan anggaran dalam rangka pembayaran kenaikan tunjangan kinerja, dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan.

#### 1.2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementrian Kominfo, Ditjen SDPPI, dan jajaran pemerintah maupun swasta mitra Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang ada di Wilayah Propinsi Jawa Barat.

- Surat masuk selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 802 (delapan ratus dua) surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 806 (delapan ratus enam) surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 417

(empat ratus tujuh belas) surat.

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 18 (delapan belas) kontrak.

### **1.3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT.**

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki sumber daya manusia sejumlah 40 (empat puluh) pegawai ASN, 3 (tiga) pegawai Non ASN, dan 34 (tiga puluh empat) tenaga outsourcing.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 2 pegawai, golongan III sejumlah 29 pegawai dan golongan II sejumlah 9 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 10 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 18 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 6 pegawai, S1 sejumlah 14 pegawai, D3 sejumlah 5 pegawai, SMA sejumlah 13 pegawai, SMP 1 pegawai dan SD 1 Pegawai

### **1.4. Jumlah dokumen keuangan UPT.**

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung terdiri dari laporan keuangan bulanan, revisi administrasi DIPA, dan laporan LPJ Bendahara Tahun 2019 yang dilakukan secara bulanan selama tahun anggaran 2019.

## **2. Indikator Kinerja 2: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).**

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggarannya adalah sebesar 92.97. Skor tersebut disebabkan skor pada pengeloan Uang Persediaan hanya sebesar 8.40 dari 10 artinya skor tersebut kurang optimal akibat pengelolaan uang persediaan atau pelaksanaan penggantian uang persediaan melebihi batas maksimal ganti uang persediaan (akibat keterlambatan penggunaan uang persediaan sehingga penggunaan uang persediaan juga terlambat), pengelolaan data kontrak 10.95 dari 15 terjadi karena pendaftaran kontrak ke KPPN melebihi batas tanggal pendaftaran ADK kontrak, kesalahan SPM 5.10 dari 6 artinya tingkat kesalahan atau perbaikan SPM sering terjadi, dan halaman III DIPA 3.94 dari 5 disebabkan pelaksanaan revisi pada halaman III sering dilakukan sampai 4 (empat) kali dalam setahun.

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh*

*Allhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya dan kekuatan-Nya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2019 serta dapat menyelesaikan penyusunan Buku Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2019 sebagai informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan anggaran selama periode tahun anggaran 2019.

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik sebagai bahan masukan dan koreksi kegiatan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja secara tepat guna dan sasaran. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan produktifitas instansi.

LAKIN ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Pelaksanaan perencanaan dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui LAKIN ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2019.

LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 dan dapat memberikan gambaran umum mengenai capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode tahun anggaran 2019. Semoga LAKIN ini dapat bermanfaat, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh.*

Bandung, Januari 2020

Kepala Balai,



**Zainuddin Kalla**

## D A F T A R I S I

Ringkasan Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	<b>11</b>
A. Latar Belakang .....	11
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
C. Potensi dan Permasalahan Strategis .....	14
D. Sistematika Pelaporan .....	17
<b>BABII PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .....	18
B. Sasaran Program .....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	18
<b>BABIII LAPORAN KINERJA</b> .....	<b>20</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi .....	21
<b>Sasaran Kegiatan 2 :</b> Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Yang Bersih, Efisien dan Efektif .....	37
B. Kinerja Lainnya .....	53
C. Realisasi Anggaran .....	59
<b>BABIV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>

# Bab I

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Kemajuan yang sangat pesat di sektor telekomunikasi tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Direktorat Jenderal SDPPI). Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Direktorat Jenderal SDPPI) merupakan salah satu unit kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai organisasi yang mengelola regulasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI bertugas menentukan norma, standar, kriteria yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau institusi pengelola layanan di bidang telekomunikasi, pos, dan informatika. Regulasi-regulasi tersebut juga berlaku bagi masyarakat secara umum dan para penyelenggara bidang telekomunikasi khususnya.

Agar regulasi tersebut dapat diaplikasikan, maka aspek penyadaran masyarakat, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum harus dilakukan dan ditegakan. Sedangkan sebagai organisasi pengelola layanan publik, Direktorat Jenderal SDPPI harus memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi dan preferensi masyarakat pada umumnya dan para pemangku kepentingan pada khususnya. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang sempurna, profesional, dan berintegritas harus terus dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur.

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu andalan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan negara bukan pajak dari Sektor Telekomunikasi menjadikan Sektor Telekomunikasi menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak nomor dua setelah minyak dan gas.

Kedepan, upaya untuk mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan terus diupayakan dengan menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat pos dan informatika. Dengan demikian cita-cita menuju Indonesia yang informatif yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, memanfaatkan dan menyebarkan informasi serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi akan dapat terwujud.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis – Direktorat Jenderal SDPPI senantiasa mendukung program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Program kerja Balai Monitor Bandung secara umum diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder yang terkait melalui pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Jawa Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan LAKIN ini dapat memberikan informasi yang memadai atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2019 dan berkontribusi positif terhadap meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada umumnya dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program;
- 2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- 3) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- 4) Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 5) Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;

- 6) Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- 7) Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- 8) Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- 9) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdiri dari:

#### 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat.

#### 2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

#### 3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**Gambar 1.1.**

Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung



### C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Jawa Barat dibentuk pertamakali tanggal 14 Agustus 1926 berdasarkan penetapan Pemerintah Hindia Belanda melalui staatblad 1924 Nomor: 378 tanggal 14 Agustus 1926, pada masa pra kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membagi kembali Daerah Negara Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang salah satunya Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Jawa barat ini kemudian ditetapkan kembali oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu



Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km<sup>2</sup> menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kota Banjar yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jumlah penduduk di daerah penyangga Ibukota, yaitu di

Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok sebanyak 11.930.991 Jiwa atau 26% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Dengan begitu dapat disimpulkan seperempat penduduk Jawa Barat tinggal di daerah penyangga Ibu Kota. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 Jiwa atau 18% dari total penduduk Jawa Barat, artinya hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi. Kalau dijumlahkan penduduk yang tinggal di penyangga Ibu Kota dan Bandung Raya, maka didapat jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sebanyak 20.601.492 Jiwa atau 44% dari total jumlah penduduk Jawa Barat. Terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jawa Barat tinggal di kedua daerah tersebut.

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas wilayah: sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 - 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatahan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; "Herang Caina Beunang Laukna" yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menghargai.

Sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah Jawa Barat saat ini sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi. Dalam konteks pelayanan publik, inisiatif pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Hal itu juga didorong oleh kebijakan desentralisasi yang strategis untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik betul-betul dapat mendorong proses transparansi yang pada akhirnya akan tercipta sistem pelayanan yang efektif dan sekaligus efisien.

Hal tersebut, memberikan sebuah potensi yang besar terhadap peningkatan jumlah pengguna frekuensi radio di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, sekaligus merupakan tantangan dan hambatan yang perlu diantisipasi sejak dini melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung serta skill sumber daya manusia yang mumpuni secara kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, wilayah tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berkurang menjadi 22 kabupaten/kota setelah Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor menjadi wilayah kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perangkat utama monitoring maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung saat ini kurang memadai jika dibanding dengan jumlah wilayah yang harus dimonitor sehingga dibutuhkan pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru terutama perangkat monitoring dan okupansi penggunaan frekuensi radio.
2. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang memiliki kompetensi Teknis dan ahli dalam mengoperasikan perangkat cukup terbatas sehingga meskipun jumlah pengendali frekuensi cukup memadai tetapi skill yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*) melalui pelatihan teknis berkelanjutan.
3. Sumber Daya Manusia ASN yang terdapat di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung rata-rata berusia 40-58 tahun yang merupakan masa-masa usia pensiun, tentu hal ini akan menambah kapabilitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung di masa mendatang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio.
4. Rendahnya anggaran biaya kegiatan pengembangan sumber daya manusia ASN terutama dalam penetrasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dalam menyongsong era industri 4.0.
5. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisai yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.

6. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) yang membutuhkan intensitas pengawasan dan pengendalian tentunya hal tersebut dapat dilaksanakan jika perangkat dan SDM memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

#### D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Laporan kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;

Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Bab II

# Perjanjian Kinerja

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

### B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun yang juga merupakan bagian dari Renstra Kominfo 2015-2019.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%
		1.1. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota.	80%
		1.2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan
		1.3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur.	35%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		1.4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal.	50%
		1.5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.	1 Laporan
		1.6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR.	85%
		1.7. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio.	95%
		2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.	100%
		2.1. 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.	85%
		2.2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT.	100%
		2.3. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL.	4 Laporan
		2.4. Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan
		2.5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%
		1.1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku.	1 Dokumen
		1.2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku.	1 Dokumen
		1.3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT.	1 Dokumen
		1.4. Jumlah dokumen keuangan UPT.	1 Dokumen
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	94%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.655.367.000,- (*empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.634.645.000,- (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima rupiah*) dan PNBPN sebesar Rp. 7.020.722.000,- (*tujuh miliar dua puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

## Bab III

# Laporan Kinerja

Sebagai perwujudan kinerja, LAKIN 2019 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80.00%	100.00%
		1.1. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota.	80.00%	90.90%
		1.2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	12 Laporan
		1.3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur.	35.00%	66.37%
		1.4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal.	50.00%	100.00%
		1.5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.	1 Laporan	1 Laporan
		1.6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR.	85.00%	97.88%
		1.7. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio.	95.00%	100.00%
		2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
		2.1. 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.	85%	85%
		2.2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT.	100%	100%
		2.3. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah dilimpahkan ke KPKNL.	4 Laporan	4 Laporan
		2.4. Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio	12 Laporan	12 Laporan
		2.5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	3. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%	100%
		3.1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku.	1 Dokumen	1 Dokumen
		3.2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku.	1 Dokumen	1 Dokumen
		3.3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT.	1 Dokumen	1 Dokumen
		3.4. Jumlah dokumen keuangan UPT.	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score).	94.00%	92.97%

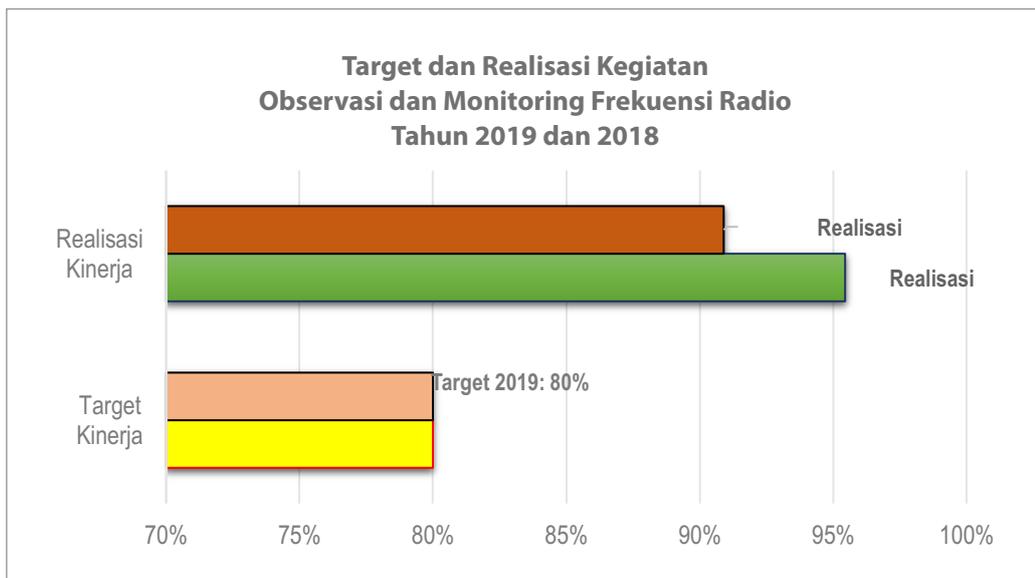
## SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

### 1. IK-1 Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

#### 1.1. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota.

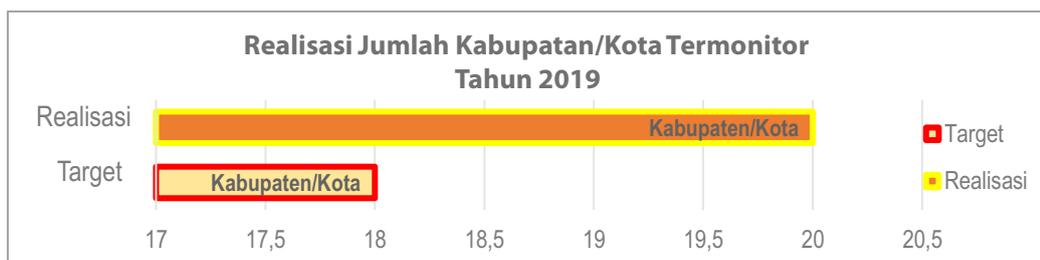
Kegiatan observasi dan monitoring pengguna frekuensi radio bertujuan untuk memonitor penggunaan dan okupansi frekuensi radio. Kegiatan ini berdampak langsung terhadap tinggi rendahnya gangguan atau pengaduan dari para pengguna frekuensi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui okupansi penggunaan frekuensi radio. Cakupan kegiatan observasi dan monitoring ini adalah observasi dan monitoring semua pengguna frekuensi radio baik radio siaran, radio amatir, radio konsesi, televisi siaran, dan seluler yang terbagi ke dalam 22 (dua puluh dua)

subservice range frekuensi radio. Target indikator kinerja Kabupaten/kota yang dapat dimonitor adalah 80% kabupaten/kota dapat dimonitor. Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan observasi dan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 16 (enam belas) kali kegiatan untuk 18 (delapan belas) wilayah kota/kabupaten. Dari 22 (dua puluh dua) wilayah kota/kabupaten tersebut termonitor 20 (dua puluh) wilayah kota/kabupaten atau 90.90% kabupaten/kota termonitor. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2019)

Dari jumlah target monitor yang harus dilaksanakan sebanyak 80% kabupaten/kota atau sebanyak 18 (delapan belas) kabupaten/kota, termonitor 90.90% kabupaten/kota atau sebanyak 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat perbedaan akibat tidak semua anggaran kegiatan pemantauan frekuensi radio dialokasikan untuk kegiatan pemantauan 22 (dua puluh dua) pita frekuensi radio tetapi untuk kegiatan pemantauan frekuensi dalam rangka event penting tertentu dan kegiatan pemantauan penggunaan perangkat telekomunikasi.



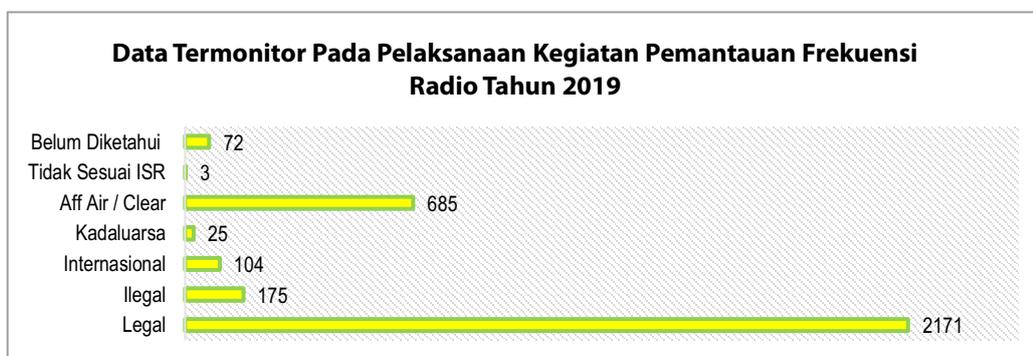
Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2019)

Adapun kabupaten/kota yang telah dilakukan pemantauan adalah:

WILAYAH	LOKASI TEST POINT	WILAYAH	LOKASI TEST POINT
MAJALENGKA	Majalengka	CIREBON	Kapetakan
	Kadipaten		Sumber
SUMEDANG	Situraja		Palimanan
	Sumedang Selatan	KOTA CIREBON	Kejaksan
PURWAKARTA	Purwakarta	CIANJUR	Cianjur
	Wanayasa		Cibeber
KARAWANG	Karawang Barat	TASIKMALAYA	Singaparna
	Cikampek		Ciawi
KOTA SUKABUMI	Cikole	KOTA TASIKMALAYA	Kawalu
	Warudoyong		Cihideung
SUKABUMI	Cibadak	KOTA BANDUNG	Arcamanik
	Sukaraja		Cicendo
KOTA BANDUNG	Bandung Wetan		Batununggal
BANDUNG BARAT	Ngamprah	SUBANG	Subang
BANDUNG	Soreang	GARUT	Tarogong Kidul
	Cileunyi		Cibatu
KOTA BANJAR	Banjar		Cikajang
	Pataruman	INDRAMAYU	Indramayu
KAB. PANGANDARAN	Pangandaran	CIAMIS	Ciamis
	Cijulang		

Keterangan: 20 (dua puluh) kota/kabupaten 39 (tiga puluh sembilan) lokasi test point.

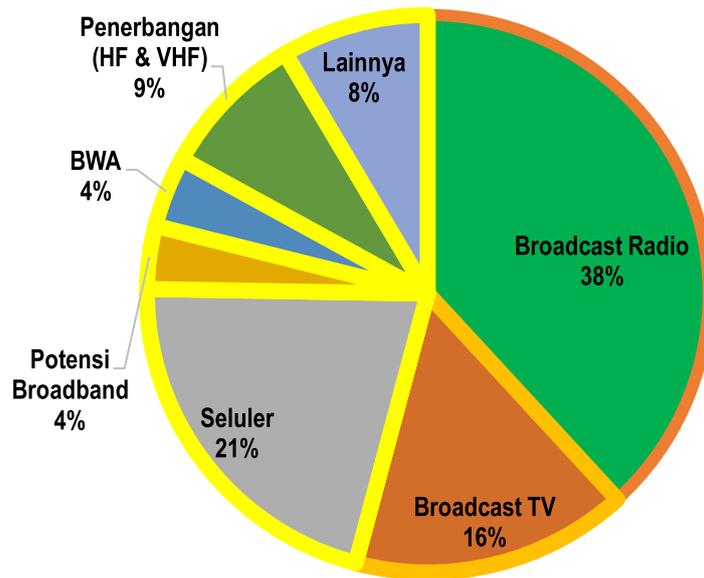
Dari 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang termonitor terdapat beberapa subservice yang penggunaannya cukup signifikan yaitu pengguna frekuensi radio Siaran FM pada range frekuensi radio 87,50 MHz – 108,00 MHz dan TV Siaran Analog pada range frekuensi radio 478,00 MHz – 806,00 MHz serta pita frekuensi seluler dari band 450 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, dan 2300 MHz yang ada di wilayah Jawa Barat dengan detail sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2019)

Diagram di atas menunjukkan data termonitor hasil pelaksanaan observasi dan monitoring yang dilakukan di 20 (dua puluh) kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat selama tahun 2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah data pengguna frekuensi radio yang berizin (legal) adalah 2171 (dua ribu seratus tujuh puluh satu) data. Sedangkan, data izin yang tidak termonitor atau *off air* adalah 685 (enam ratus delapan puluh lima) data.

#### Sebaran Data Hasil Pemantauan Berdasarkan Subservice



Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor" dari target 80% kabupaten/kota dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, jumlah kabupaten/kota yang termonitor adalah 90,90%. Capaian 90,90% tersebut telah melebihi target yang harus dicapai yaitu 80% dengan selisih antara capaian dan target adalah 10,90%. Jika dibanding dengan capaian tahun 2018 pada tahun 2019 mengurangi penurunan jumlah kabuapten/kota termonitor, pada tahun 2018 jumlah termonitor adalah 18 kota/kabupaten sedangkan di tahun 2019 adalah 20 kota/kabupaten penurunan ini terjadi karena anggaran kegiatan pemantauan tahun 2019 sebagian digunakan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan pemantauan perangkat pos dan informatika, kegiatan event penting seperti dukungan pengamanan frekuensi Hubdam, dan kegiatan monitoring dalam rangka pengujian/uji coba PPDR (komunikasi kebencanaan) yang dilaksanakan dalam beberapa kali kegiatan di wilayah Pangandaran.

## 1.2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable

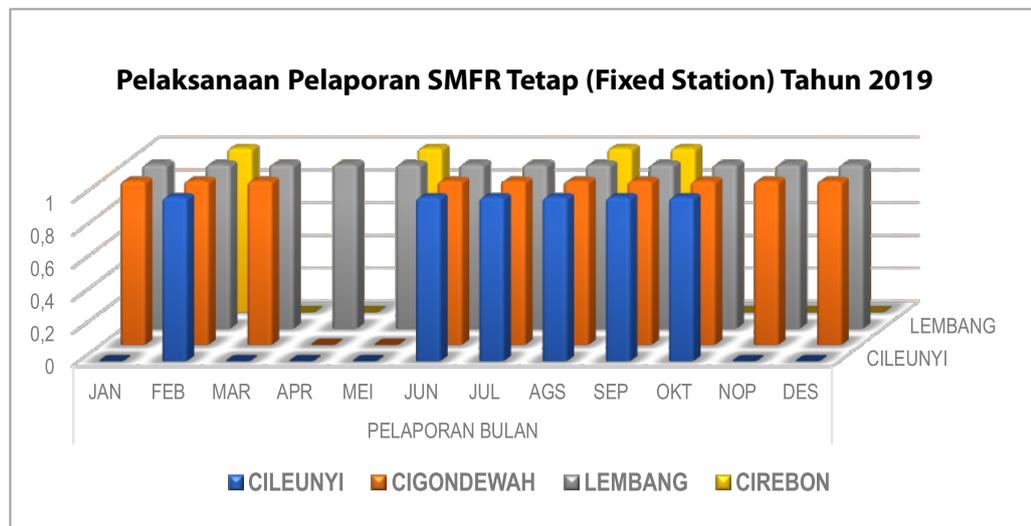
Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ditargetkan melaksanakan kegiatan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable di wilayah Jawa Barat sebanyak 12 (dua belas) laporan per SMFR Tetap. Sampai dengan bulan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 12 laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap atau dengan kata lain capaiannya adalah 100.00%.

### Laporan Hasil Pemantauan SMFR Tetap (*Fixed Portable*) Tahun 2019

LOKASI SMFR	PELAPORAN BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
CILEUNYI	OFF	1	OFF	OFF	OFF	1	1	1	1	1	OFF	OFF
CIGONDEWAH	1	1	1	OFF	OFF	1	1	1	1	1	1	1
LEMBANG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CIREBON	OFF	1	OFF	OFF	1	OFF	OFF	1	1	OFF	OFF	OFF

Keterangan: OFF = Tidak dapat mengambil data atau data tidak bisa diolah.

Adapun secara visualisasi pelaksanaan pemantauan menggunakan stasiun monitoring tetap frekuensi radio (SMFR) tahun 2019 adalah sebagai berikut:

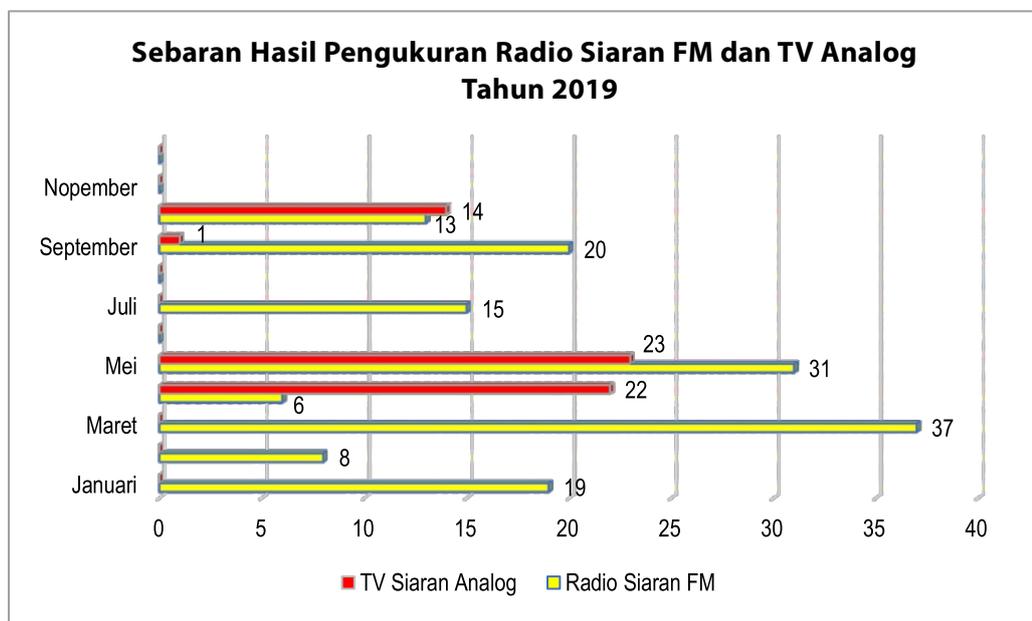


Sumber: Hasil Olahan Data Seksi PP (2019)

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaporan hasil pemantauan menggunakan SMFR telah dilakukan meskipun pada beberapa bulan sering terjadi kendala koneksi atau permasalahan jaringan sehingga data tidak bisa di ambil.

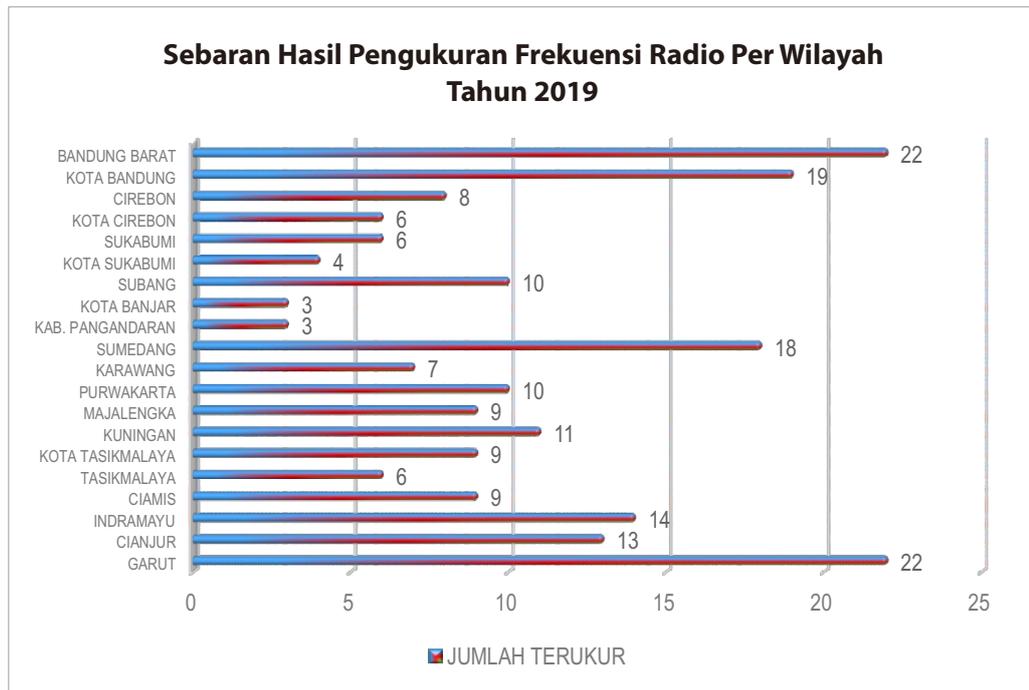
### 1.3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur.

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target pelaksanaan kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Jawa Barat sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2019 sebesar 35% dari 342 ISR yang terdaftar pada data SIMF. Sampai dengan bulan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dengan capaian sebesar 61,11% yaitu 149 stasiun Radio Siaran FM dan 60 stasiun televisi siaran analog dengan total 209 ISR dari 342 ISR di wilayah Jawa Barat yang menjadi kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Data sebaran hasil pengukuran Radio Siaran FM dan TV Siaran Analog tahun 2019 per bulan adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat TV Siaran dan Radio Siaran yang belum dilakukan pengukuran dari total target 342 (tiga ratus empat puluh dua) TV Siaran Analog dan Radio Siaran FM yang baru dapat dilakukan pengukuran adalah 209 (dua ratus sembilan) sehingga masih terdapat sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) TV Siaran Analog dan Radio Siaran FM yang belum dilakukan pengukuran. Hal tersebut disebabkan karena kecilnya jumlah kegiatan pengukuran yang ada di tahun 2019. Adapun sebaran hasil pengukuran per wilayah yang telah dilakukan pengukuran adalah:

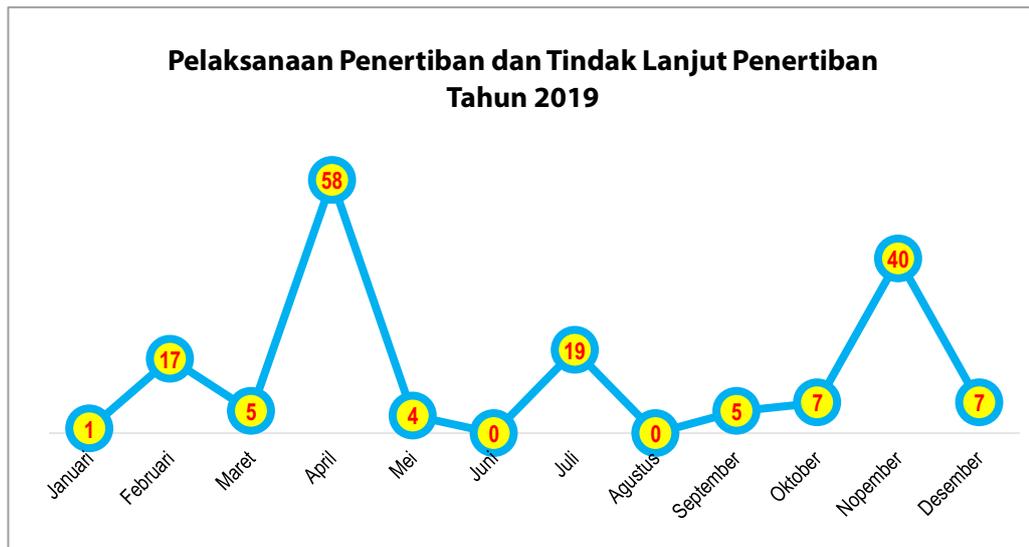


Sumber: Data Seksi PP (2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, pada indikator “Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 61,11% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 26,11%.

#### 1.4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal.

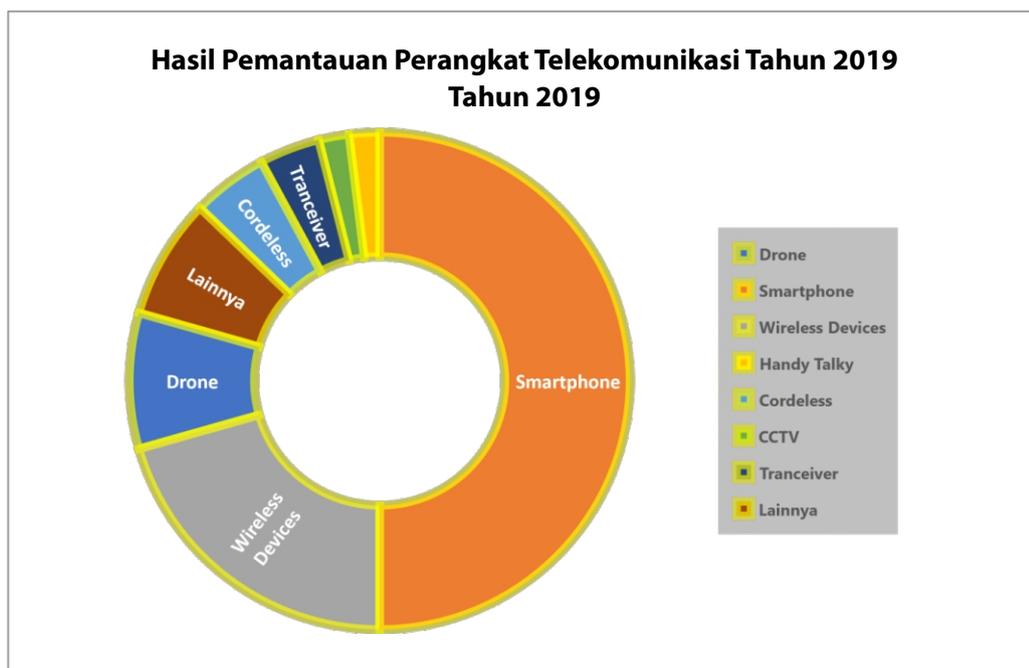
Pada tahun anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung dengan target 50% kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio, sementara pada program kerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung merencanakan program kerja pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 12 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 2 kali di wilayah Jawa Barat. Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan tindak lanjut penertiban sebanyak 12 kali kegiatan dengan hasil pengguna frekuensi ilegal sebanyak 163 pengguna dengan rincian 158 diperingatkan dan 5 pengguna diamankan. Kemudian, kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan terhadap 163 pengguna frekuensi ilegal dengan hasil penindakan dalam bentuk pembinaan dan tidak lanjut pemusnahan barang bukti yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya. Adapun sebaran pelaksanaan penertiban dan tindak lanjut hasil penertiban selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

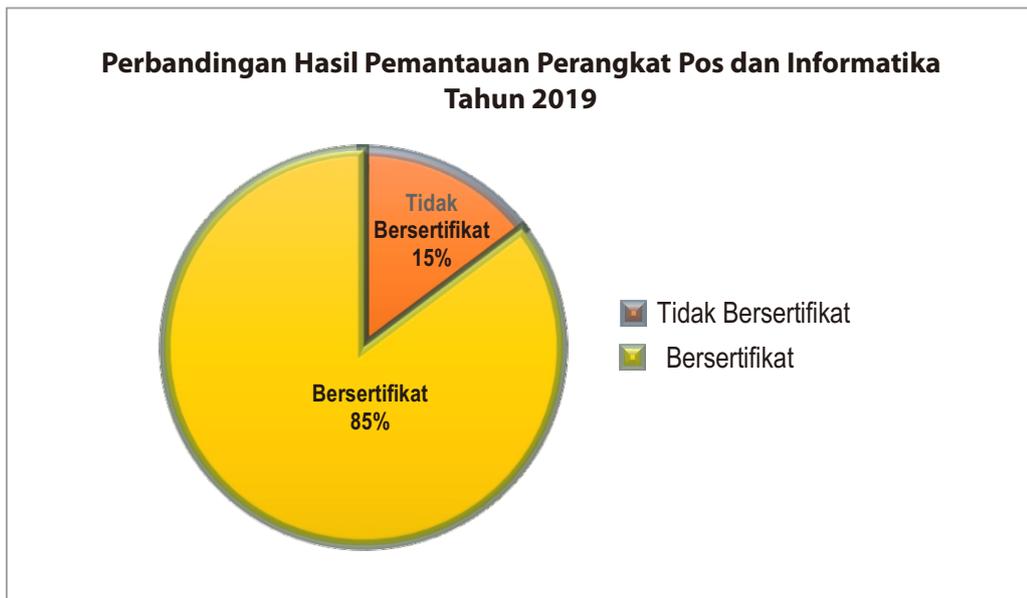
### 1.5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi.

Pada tahun anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung memiliki target 1 kali kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi. Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan 2 kali kegiatan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi yang dilakukan di Kota Bandung pada 102 (seratus dua) perangkat telekomunikasi dengan rincian 15 tidak bersertifikat dan 87 bersertifikat.



Sumber: Data Seksi PP (2019)

Jumlah perangkat yang dapat dilakukan pemantauan terbanyak adalah perangkat smartphone atau telepon seluler sebanyak 51 (lima puluh satu) perangkat disusul dengan perangkat-perangkat wireless sebanyak 21 perangkat. Sedangkan perbandingan antara perangkat yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

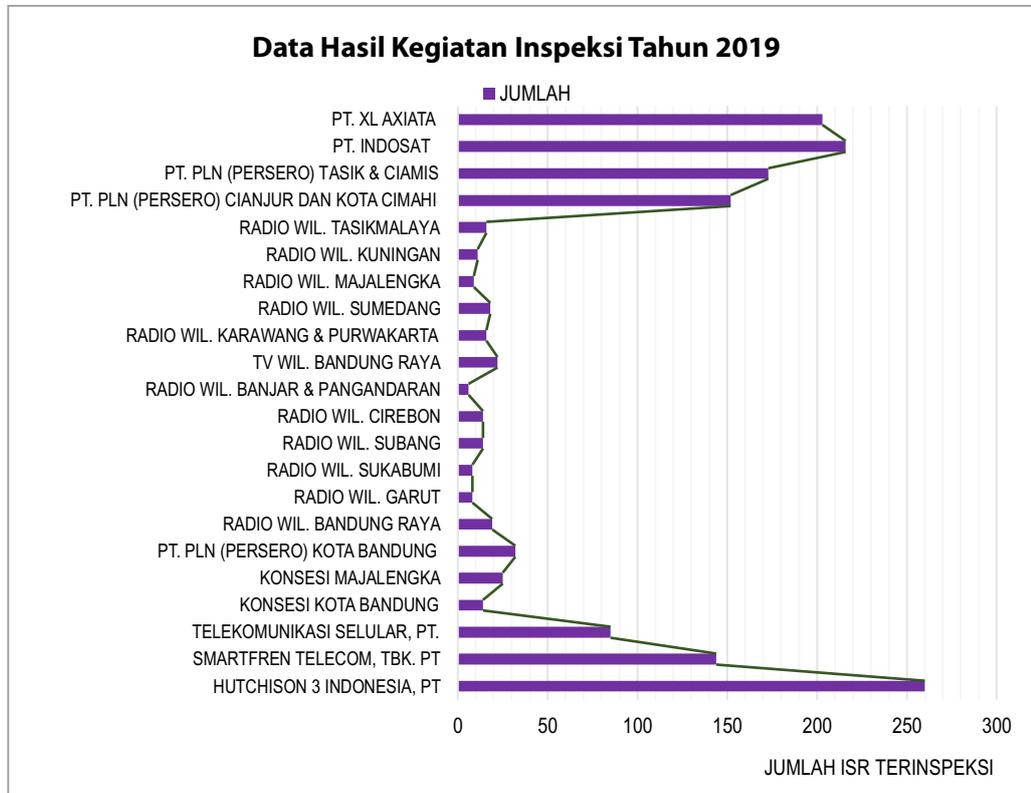
#### 1.6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR.

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung ditarget memenuhi 85% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 1465 (seribu empat ratus enam puluh lima) data sample ISR Microwave Link yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI. Jumlah target kegiatan inspeksi tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah 10 (Sepuluh) kegiatan di wilayah Jawa Barat. Sampai dengan Desember 2019 data yang dapat diinspeksi adalah 1465 frekuensi link yang telah ditindaklanjuti adalah 1434 Microwave Link (sesuai ISR 648 Microwave Link dan tindaklanjut pengurusan izin/penggudangan 786 Microwave Link) atau sebesar 97.88%. Hasil pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR adalah:

Jumlah Sampling	Hasil Inspeksi Lapangan				Hasil Tindak Lanjut		
	Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR	(Off-Air)	Tidak Berizin/Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Sesuai ISR
1465	648	205	143	469	786	31	648

Sumber: Data Seksi PP (2019)

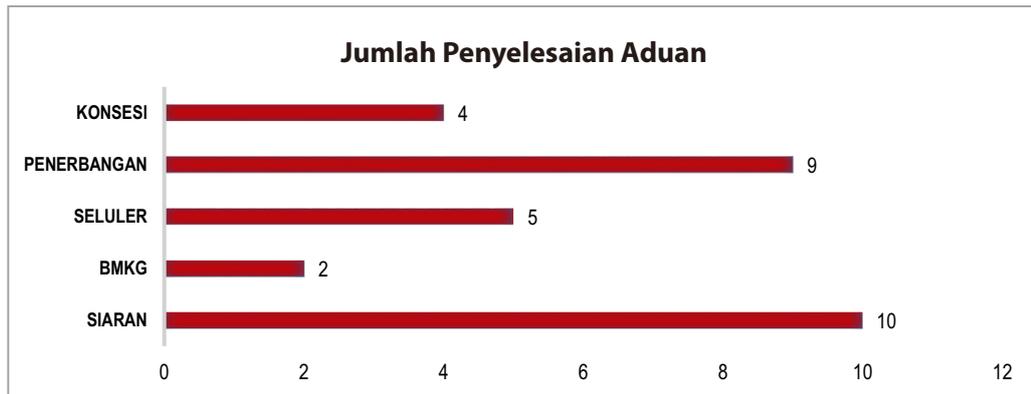
Sedangkan, sebaran hasil pelaksanaan kegiatan inspeksi tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

### 1.7. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan

Pada tahun anggaran 2019, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki target 21 (dua puluh satu) kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Jawa Barat dengan target pada perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah dilaksanakan 30 aduan gangguan di tahun 2019 dengan penyelesaian aduan/klaim gangguan adalah 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi *interference* pada aduan yang sama (*clear*). Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2019 adalah:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

Berdasarkan gambar di atas komposisi penyelesaian aduan gangguan tertinggi adalah gangguan frekuensi penerbangan dan gangguan frekuensi siaran. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan frekuensi penerbangan dalam jumlah yang cukup tinggi, begitu juga gangguan yang terjadi pada frekuensi siaran terutama radio siaran FM. Secara umum gangguan berasal dari pengguna frekuensi yang ada di bawahnya yaitu range frekuensi radio siaran dari 87,50 MHz – 108,00 MHz yang mengalami spurious terhadap frekuensi penerbangan 108,00 MHz – 137,00 MHz.

## 2. IK-2 Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio.

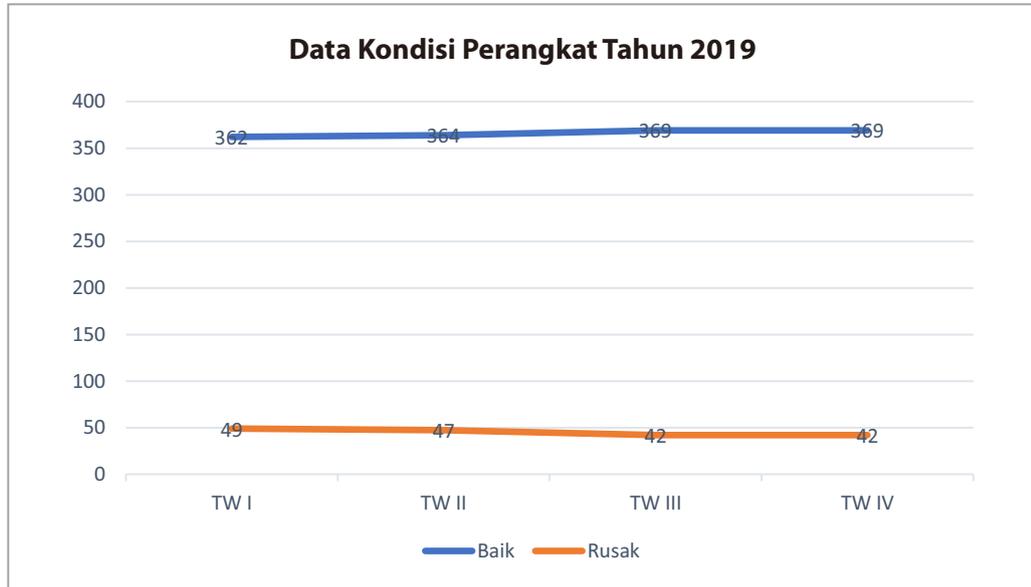
### 2.1. 85% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 89.78%. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar 89.78%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	89.78%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) berfungsiya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT” telah terjadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

## 2.2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menyelenggarakan 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi Perijinan Frekuensi Radio Dinas Maritim yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 di Lapangan Parkir Mangrove Pantai Karangsong Indramayu. Peserta yang diundang sebanyak 150 orang, terdiri dari para nelayan, pemilik kapal dengan kapasitas 5-30 Gross Tonnages (GT) dari wilayah Indramayu dan instansi terkait. Kegiatan sosialisasi ini sejalan dengan dipilihnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebagai salah satu dari 8 (delapan) UPT pilot project di Direktorat Operasi Sumber Daya dalam pelaksanaan Maritim on The Spot. Hingga bulan Desember 2019 terdapat 48 orang berprofesi nelayan yang mendaftarkan menjadi anggota IKRAP.



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019 indikator "Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT" telah dilaksanakan sesuai rencana yaitu sebanyak 1(satu) kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

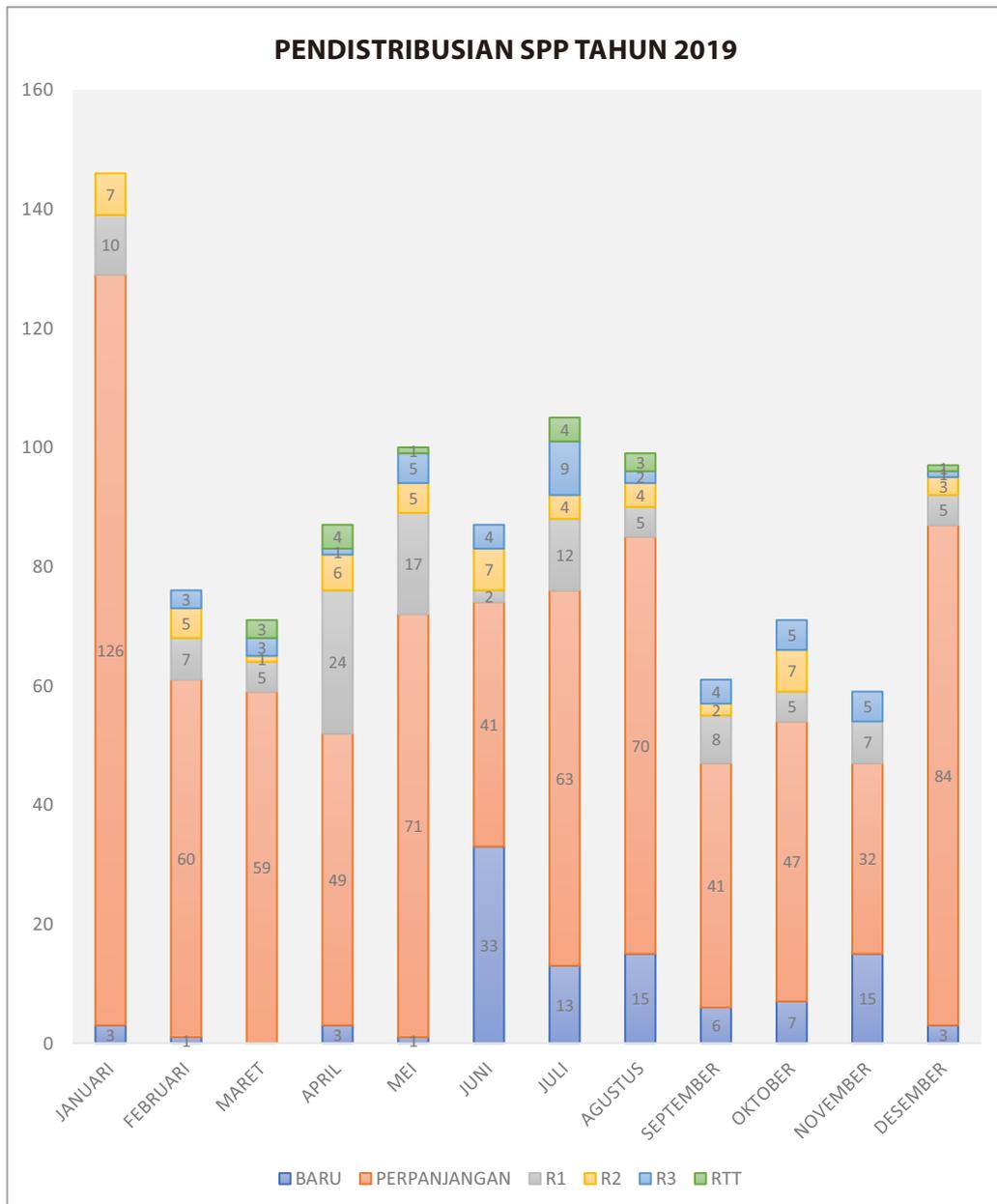
### 2.3. Jumlah laporan Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT.

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja di atas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut:



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator "Persentase (%)Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT" telah didistribusikan sejumlah ISR yang diterbitkan,sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

#### **2.4. Jumlah Laporan Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.**

Indikator Kinerja Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat

diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	29 - 31 Januari	KPKNL Bandung
2	06 - 08 Februari	KPKNL Tasikmalaya
3	06 - 08 Februari	KPKNL Cirebon
4	20 - 22 Maret	KPKNL Tasikmalaya
5	27 - 29 Maret	KPKNL Bogor
6	10 - 12 April	KPKNL Cirebon
7	22 - 24 Mei	KPKNL Purwakarta
8	22 - 24 Mei	KPKNL Cirebon
9	19 - 21 Juni	Bandung Barat
10	10 - 12 Juli	KPKNL Cirebon
11	11 - 13 September	KPKNL Bogor
12	16 - 18 Oktober	KPKNL Purwakarta
13	13 - 15 November	KPKNL Cirebon
14	04 - 06 Desember	KPKNL Bandung
15	11 - 13 Desember	KPKNL Tasikmalaya

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

## 2.5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator

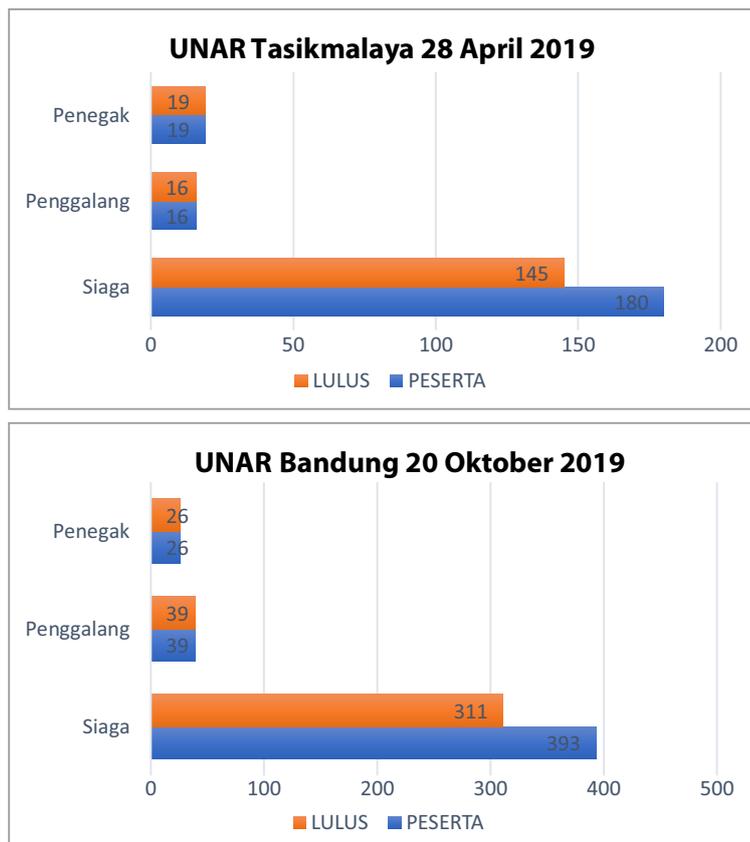
hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR di Jawa Barat



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator "Persentase (%) Pelaksanaan UNAR" telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

## SASARAN KEGIATAN 2: TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan layanan eksternal dan layanan internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio yang merupakan layanan eksternal sebagai bentuk pelayanan publik dan layanan administrasi sebagai bentuk layanan internal. Kegiatan ini merupakan manivestasi pelayanan Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Barat.

### 1. IK-1: Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Terdiri dari 4 (empat) subindikator, yaitu:

#### 1.1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan ditahun 2019 sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

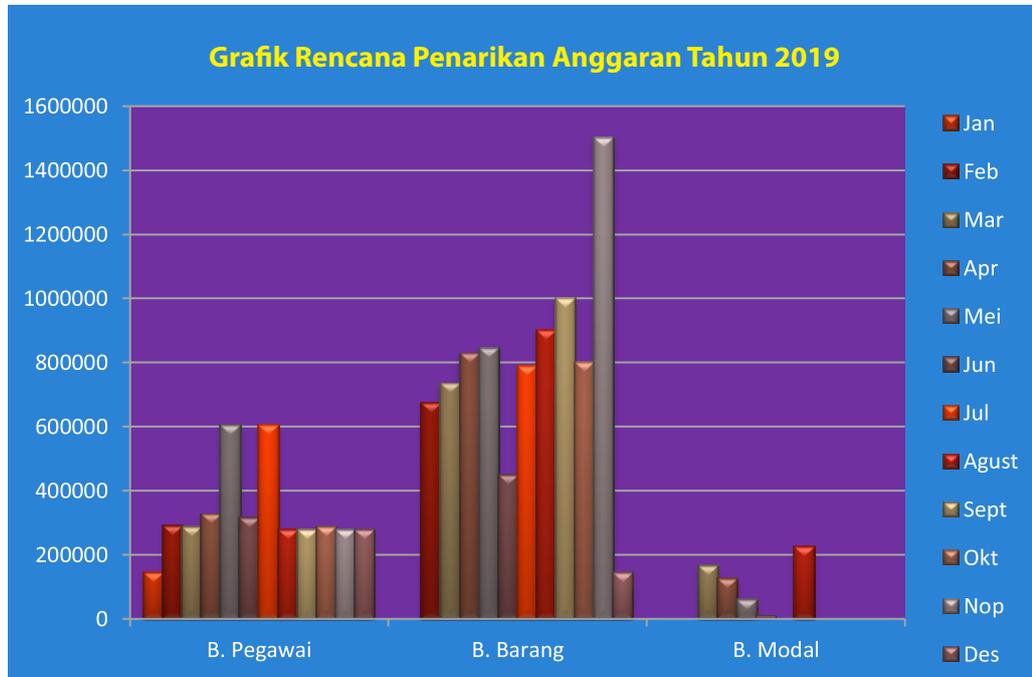
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Pada tahun 2019 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sebesar Rp. 14.500.949.000,- (*empat belas miliar lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBK. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung adalah:

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	3053.006	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas I Bandung, terdiri dari:	49 Kegiatan	Rp.1.304.795.000,-
		1. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota	3 Kegiatan	Rp. 14.670.000,-

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
		2. Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp. 239.900.000,-
		3. Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 25.300.000,-
		4. Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp. 377.500.000,-
		5. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota	2 Kegiatan	Rp. 8.380.000,-
		6. Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota	7 Kegiatan	Rp. 194.600.000,-
		7. Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	4 Kegiatan	Rp. 16.424.000,-
		8. Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	10 Kegiatan	Rp. 235.700.000,-
		9. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 16.035.000,-
		10. Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota	1 Kegiatan	Rp. 28.860.000,-
		11. Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota	1 Kegiatan	Rp. 62.168.000,-
		12. Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota	1 Kegiatan	Rp. 85.258.000,-
2	3053.043	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Bandung, terdiri dari :	18 Kegiatan	Rp. 348.955.000,-
		1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	5 Kegiatan	Rp. 20.250.000,-
		2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	13 Kegiatan	Rp. 328.705.000,-
3	3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari:	1 Layanan	Rp.3.946.148.000,-
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp.1.134.000.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp.1.028.210.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Rp. 392.616.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp.1.391.322.000,-
4.	3053.951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 139.550.000,-
		1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp. 64.525.000,-
		2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		Rp. 75.025.000,-
5.	3053.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp.8.761.501.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp.4.329.799.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp.4.431.702.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2019 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menetapkan rencana penggunaan anggaran (disburstmen plan)



### 1.1. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku.

#### a. Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Barat serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio.

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 802 (delapan ratus dua) surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 808 (delapan ratus delapan) surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) surat.

#### b. Kerumahtangaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.

- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan dalam SPK	Metode Pengadaan	Penyedia	SPK		
				Nomor	Tanggal	Nilai
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk perangkat pendukung TCI Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	PT TEKNOLOGI CAHAYA INTEGRASI INDONESIA	03/951.53/BALMON.32/PL.02.02/03/2019	12-Mar-19	Rp164,835,000
2	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa 1 Unit Rotator, 1 Unit Power Supply serta Grounder untuk perangkat HF pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	CV YOUSHA PUTRA PERKASA	05/951.53/BALMON.32/PL.02.02/04/2019	12-Apr-19	Rp59,908,750
3	Pengadaan perangkat telekomunikasi radio berupa HT, RIG, dan Repeater Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2019	Pengadaan Langsung	PT MITRAINDO BAKTI BUANA	11/951.53/BALMON.32/PL.02.02/09/2019	16-Sep-19	Rp189,200,000
4	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa 4 Unit PC, 3 Unit Scanner, 2 Unit Printer, 1 Unit Laptop, dan 6 Software Microsoft Office pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	E-Purchasing	PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI	04/951.53/BALMON.32/PL.02.02/04/2019	01-Apr-19	Rp125,838,500
5	Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan dinding gedung empat lantai pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	CV DEKA CONSTRUCTION	06/951.53/BALMON.32/PL.02.02/06/2019	18-Jun-19	Rp184,117,241
6	Pekerjaan Pemeliharaan dan Rumah Dinas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	CV FALAH ABADI	14/994.52/BALMON.32/PL.02.02/09/2019	27-Sep-19	Rp71,092,016
7	Pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Lantai Basemant Pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	CV KARYA JAYA	15/994.52/BALMON.32/PL.02.02/11/2019	26-Nov-19	Rp94,641,827

No	Nama Kegiatan dalam SPK	Metode Pengadaan	Penyedia	SPK		
				Nomor	Tanggal	Nilai
8	Pemeliharaan Tower Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	CV MULKINDO PERKASA	09/994.52/BALMON.32/KU.01.01/08/2019	26-Aug-19	Rp143,668,800
9	Pemeliharaan Penangkal Petir Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun 2019	Pengadaan Langsung	PT SABASIOR INTERNASIONAL	01/KTI/SBI/IX/19	24-Sep-19	Rp34,001,000
10	Pemeliharaan Kesisteman Perangkat Mobil Monitoring Frekuensi Radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Pengadaan Langsung	PT TRI SINERGY SOLUTION	10/994.52/BALMON.32/KU.01.01/09/2019	11-Sep-19	Rp159,885,000
11	Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2019	Pengadaan Langsung	CV ANDARA	08/078.52/BALMON.32/KU.01.04/07/2019	27-Jul-19	Rp113,307,700
12	Pelaksanaan Medical Check Up Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2019	Pengadaan Langsung	PT PRODIA WIDYAHUSADA	07/951.53/BALMON.32/PL.02.02/07/2019	01-Jul-19	Rp70,300,000
13	Pekerjaan Sewa Tanah Slave Cirebon Tahun Anggaran 2019	Pengadaan Langsung	HJ DODOH	02/994.52/BALMON.32/PL.02.02/01/2019	01-Jan-19	Rp90,000,000

### DAFTAR BMN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Elevator /Lift	Unit	1	1	
Portable Generating Set	Unit	1	1	
Stationary Generating Set	Unit	1	1	
Stationary Water Pump	Unit	5	5	
Pompa Air	Unit	4	4	
Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Unit	5	5	
Sepeda Motor	Unit	2	2	
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	3	3	
Baggage Trolley	Unit	2	2	
Mesin Kompresor	Unit	1	1	
Battery Charge	Unit	25	25	
Dongkrak Mekanik	Unit	2	2	
Transistor Tester AVO	Unit	1	1	
Spectrum Analyzer	Unit	5	5	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
SWR Meter	Unit	2	2	
Frequency Counter	Unit	8	8	
Global Positioning System	Unit	5	5	
Field Strength Meter	Unit	2	2	
Oscilloscope Main Frame With Variable Persistence Storage Tube	Unit	1	1	
Scanner (Universal Tester)	Unit	1	1	
Tool Set	Unit	2	2	
Altimeter	Unit	1	1	
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Unit	2	2	
Mesin Ketik Elektronik/Selektirik	Unit	1	1	
Mesin Penghitung Uang	Unit	1	1	
Lemari Besi/Metal	Unit	49	49	
Lemari Kayu	Unit	16	16	
Rak Besi	Unit	9	9	
Filing Cabinet Besi	Unit	26	26	
Brankas	Unit	3	3	
Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Unit	1	1	
Tabung Pemadam Api	Unit	20	20	
CCTV - Camera Control Television System	Unit	25	25	
Mesin Absensi	Unit	1	1	
Penangkal Petir	Unit	5	5	
LCD Projector/Infocus	Unit	5	5	
Panic Button System, Alarm Indicator	Unit	10	10	
Meja Kerja Besi/Metal	Unit	7	7	
Meja Kerja Kayu	Unit	49	49	
Kursi Besi/Metal	Unit	115	115	
Sice	Unit	24	24	
Bangku Panjang Kayu	Unit	6	6	
Meja Rapat	Unit	5	5	
Meja Komputer	Unit	2	2	
Meja Ketik	Unit	2	2	
Meja Resepsionis	Unit	2	2	
Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	84	84	
Pot Bunga	Unit	2	2	
Partisi	Unit	1	1	
Nakas	Unit	11	11	
Workstation	Unit	10	10	
Jam Elektronik	Unit	14	14	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	4	4	
Mesin Pemotong Rumput	Unit	7	7	
Lemari Es	Unit	2	2	
A.C. Sentral	Unit	30	30	
A.C. Split	Unit	19	19	
Exhause Fan	Unit	4	4	
Kompor Gas (Alat Dapur)	Unit	1	1	
Tabung Gas	Unit	1	1	
Mixer	Unit	1	1	
Televisi	Unit	19	19	
Amplifier	Unit	2	2	
Loudspeaker	Unit	2	2	
Sound System	Unit	2	2	
Wireless	Unit	4	4	
Unit Power Supply	Unit	5	5	
Stabilisator	Unit	1	1	
Camera Video	Unit	4	4	
Tiang Bendera	Unit	1	1	
Tangga Aluminium	Unit	4	4	
Dispenser	Unit	6	6	
Handy Cam	Unit	1	1	
Karpet	Unit	4	4	
Gordyin/Kray	Unit	55	55	
Kabel Roll	Unit	1	1	
Keset Kaki	Unit	3	3	
Kabel	Unit	24	24	
Tangki Air	Unit	2	2	
Microphone/Wireless MIC	Unit	1	1	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	11	11	
DC Converter	Unit	1	1	
Layar Film/Projector	Unit	1	1	
Camera Digital	Unit	7	7	
LCD Monitor	Unit	1	1	
Connectors	Unit	5	5	
Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Unit	2	2	
Teropong/Keker	Unit	2	2	
GPS Receiver	Unit	3	3	
Telephone (PABX)	Unit	5	5	

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Pesawat Telephone	Unit	26	26	
Handy Talky (HT)	Unit	7	7	
Facsimile	Unit	2	2	
Unit Tranceiver HF Stationery	Unit	2	2	
Unit Tranceiver VHF Portable	Unit	16	16	
Unit Tranceiver VHF Transportable	Unit	3	3	
Unit Tranceiver VHF Stationary	Unit	9	9	
Radio Link	Unit	6	6	
Alat Spektrum Frek Monitor UHF	Unit	1	1	
Spectrum Analyzer Portable for Field Use	Unit	1	1	
Peralatan Antena VHF/FM Lainnya	Unit	2	2	
Peralatan Antena UHF Lainnya	Unit	4	4	
Antena All Band	Unit	2	2	
Tower	Unit	2	2	
Lightning Protector	Unit	9	9	
Coaxial Feeder	Unit	3	3	
All Band Receiver	Unit	9	9	
Peralatan Antena Penerima MF+HF	Unit	4	4	
Peralatan Antena Penerima VHF	Unit	3	3	
Peralatan Antena Penerima UHF	Unit	3	3	
Peralatan Antena Penerima SSHF	Unit	1	1	
Radio Direction Finder	Unit	5	5	
Unit Antena Transceiver VHF Stationary	Unit	4	4	
Unit Antena Transceiver SHF Portable	Unit	6	6	
Genset	Unit	3	3	
P.C Unit	Unit	46	46	
Lap Top	Unit	25	25	
Note Book	Unit	6	6	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	16	16	
Server	Unit	3	3	
Router	Unit	7	7	
Wireless Access Point	Unit	14	14	
Fire Alarm System	Unit	1	1	
Monografi	Unit	128	128	
Lisensi	Unit	1	1	

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Balai Monitor SFR Kelas I Bandung, didukung sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan tugas-tugas dimaksud antara lain:

**1. Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung**

Balai Monitor Kelas I Bandung terletak di: Jl. Pacuan Kuda no. 146, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung Jawa Barat.



**2. Stasiun Monitoring Master**

Stasiun Monitoring Master terletak di Jl. Purbasari No.1 RT.06/RW 11, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung Jawa Barat.



### 3. Stasiun Slave Cigondewah

Stasiun Slave Cigondewah terletak di Jl. Cigondewah Hilir RT.01 / RW.09 Margaasih, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat



### 4. Stasiun Slave Cileunyi

Stasiun Slave Cileunyi terletak di Kampung Tanjakan Muncang Rt.04/Rw.06, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung.



## 5. Stasiun Slave Lembang

Stasiun Slave Lembang terletak di Kampung Sindang Wangi RT.01 RW.09, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.



## 6. Shelter Cirebon

Shelter Cirebon terletak di Jl. Benda Kondangsari RT.17 RW.06, Beber, kabupaten Cirebon.



## 7. Rumah Dinas

Balai Monitor Kelas I Bandung memiliki 4 (empat) buah rumah dinas yang terletak di Jl. Purbasari Indah no. 23-29 Rt.06 / Rw.01, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung.



### 1.3. Kepegawaian UPT.

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki sumber daya manusia sejumlah 40 (empat puluh) pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 (tiga) pegawai PPNPN serta 34 (tiga puluh empat) pegawai outsourcing

#### a. Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 18 (delapan belas) pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 9 (sembilan) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler.

#### Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

TAHUN	PENDIDIKAN					
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
2019						
Jumlah	6	14	5	13	1	1

**b. Pejabat Pengendali**

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor SFR Kelas I Bandung

NO.	FUNGSIONAL	2019
1	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya	1
2	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	2
3	Pengendali Frekuensi Ahli Pertama	3
4	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	4
5	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan	1
6	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana	4
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

**c. PPNS**

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	ZAINUDDIN KALLA NIP. 196406101989031004	Pembina Tk.1 / IV.b	Kepala Balai Monitor
2	DRADJANTI DIAN ARIYATI NIP. 196204161989032002	Penata Tk.1 / III.d	Kasubbag TU/RUTA
3	REKAN KARYONO NIP. 196311051989031001	Penata Tk.1 / III.d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
4	RUDI HERAWAN NIP. 196502141986031003	Penata Tk. I / III.d	Penyidik PNS
5	UTANG SETYA ERAWAN NIP. 196308131989031004	Penata / III/c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia
6	SIDIQ PURNOMO NIP. 198011122005021002	Penata / III/c	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan
7	ASEP WIRAHMAN NIP. 197307172005021002	Penata Muda Tk. I / III/b	Penyidik PNS

**d. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat, bimtek, dan workshop, serta mengadakan acara pembinaan mental dan disiplin pegawai yang diadakan di Padang & Bukittinggi pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2019. Untuk melihat kompetensi dan kemampuan serta untuk pemetaan pegawai yang terdapat di Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut diadakan Test Tallent Mapping yang bekerja sama dengan Konsultan Pihak Ketiga dalam bentuk Psikotest, yang kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020..



Kegiatan pembinaan mental dan disiplin pegawai di Sumatera Barat



Test Tallent Mapping

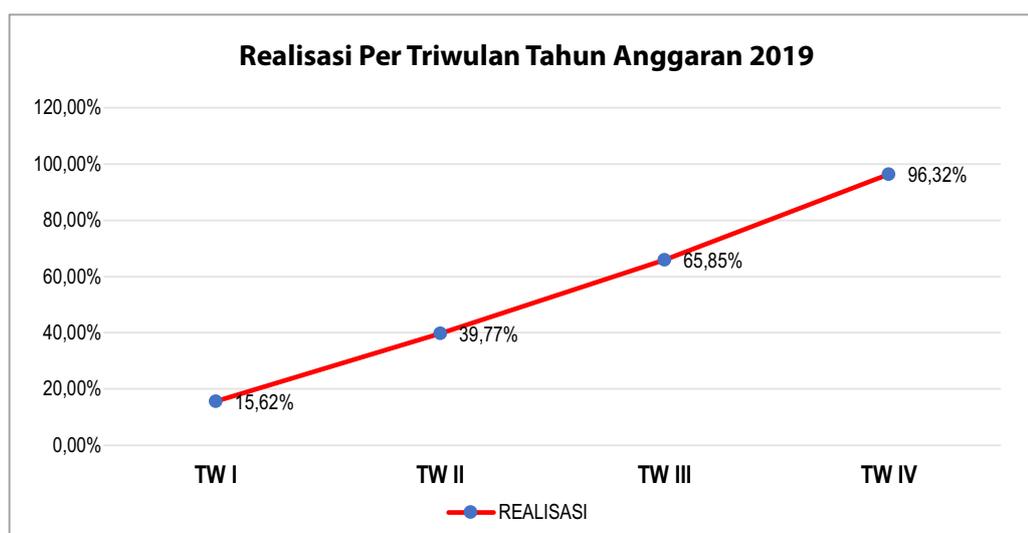
#### 1.4. Jumlah dokumen keuangan UPT.

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung tahun anggaran 2019 sesuai DIPA Nomor: 059.03.6.613391/2019 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 14.655.367.000,- (*empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.634.645.000,- (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan PNBP sebesar Rp. 7.020.722.000,- (*tujuh miliar dua puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Keg.	Pagu	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 1.368.597.000,-	59 Layanan
2	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Rp. 357.949.000,-	21 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Dltjen SDPPI	Rp. 3.075.008.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 584.020.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 9.269.793.000,-	1 Layanan

Pelaksanaan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah terserap sebesar Rp. 14.116.618.414,- dari pagu Rp. 14.655.367.000,- atau sebesar 96,32%. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung melakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali revisi administrasi berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan pejabat KPA, penambahan anggaran dalam rangka pembayaran kenaikan tunjangan kinerja, dan perubahan halaman III DIPA yaitu penyesuaian rencana penarikan.

Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (*dishbursement plant*) tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik realisasi penyerapan anggaran tahun 2019**

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember 2019 atau pada triwulan ke-3 dan ke-4.



**Grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan TA. 2019**

Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan di atas dapat diketahui secara akumulasi penyerapan anggaran setiap bulannya lebih tinggi dari pada rencana penyerapan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan” telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

## 2. IK-2: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas I Bandung capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaranannya adalah sebesar 92.97%. Skor tersebut disebabkan skor pada pengeloan Uang Persediaan hanya sebesar 8.40 dari 10 artinya skor tersebut kurang optimal akibat pengelolaan uang persediaan atau pelaksanaan penggantian uang persediaan melebihi batas maksimal ganti uang persediaan (akibat keterlambatan penggunaan uang persediaan sehingga penggunaan uang persediaan juga terlambat), Pengelolaan Data kontrak 10.95 dari 15 terjadi karena pendaftaran kontrak ke KPPN melebihi batas tanggal pendaftaran ADK kontrak, Kesalahan SPM 5.10 dari 6 artinya tingkat kesalahan atau perbaikan SPM sering terjadi, dan Halaman III DIPA 3.94 dari 5 disebabkan pelaksanaan revisi pada halaman III sering dilakukan sampai 4 (empat) kali dalam setahun.

## B. KINERJA LAINNYA

### 1. Pemusnahan Barang Sitaan Tahun 2019

Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap alat dan perangkat telekomunikasi hasil dari hasil operasi penertiban yang telah dilaksanakan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019. Klasifikasi Barang bukti yang dimusnahkan adalah tidak terstandarisasi (illegal) dan atau tidak bersertifikat dengan jenis barang bukti tersebut antara lain:

- Exciter Radio;
- Radio Komunikasi atau HT;
- STL Link;
- Penguat Signal.

Pemusnahan barang bukti dilaksanakan dengan cara Barang bukti dihancurkan dengan Stoom Wall, dan atau Palu adapun pemusnahan brang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 146 Arcamanik Kota Bandung tanggal 14 November 2019.



Gb.1. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti



Gb.2. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti.



Gb.3. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (penyusunan dan peletakan barang bukti yang akan dimusnahkan).



Gb.4. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (koordinasi antara PPNS Balmon Bandung dengan Kasi Korwas Polda Jabar).



Gb.5. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Jenis Barang Bukti Berupa Penguat Sinyal).



Gb.6. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Jenis Barang Bukti Berupa STL Link).



Gb.7. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Jenis Barang Bukti Berupa Pemancar Radio FM).



Gb.8. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Jenis Barang Bukti Berupa Modem).



Gb.9. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Jenis Barang Bukti Berupa Repeater).



Gb.10. Proses Persiapan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti (Para PPNS dan Pelaksana Pemusnahan Barang Bukti).



Gb.11. Simbolis Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti



Gb.12. Persiapan Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti.



Gb.13. Persiapan Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti.



Gb.14. Proses Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti.



Gb.15. Proses Wawancara Hasil Pelaksanaan Kegiatan.



Gb.16. Proses Wawancara Hasil Pelaksanaan Kegiatan.



Gb.17. Pemberesan Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti.



Gb.18. Pemberesan Pemusnahan atau Penghancuran Barang Bukti.

Pemusnahan barang bukti tersebut dalam rangka tertib penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, dan juga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI sehingga barang bukti yang ada dan telah diserahterimakan oleh pemilik untuk dimusnahkan serta barang bukti yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak lagi menimbulkan kerugian, gangguan gangguan, serta jika barang ini tidak dihancurkan atau dimusnahkan, akan berpotensi digunakan pengguna lain dan menyebabkan masalah baru yang sama. Adapun data barang bukti yang telah dimusnahkan pada kegiatan pemusnahan barang bukti tanggal 14 November 2019 ini adalah barang bukti hasil penertiban Balmon Bandung sejak tahun 2009 sampai tahun 2019 dengan jumlah barang bukti sebanyak 56 (lima puluh enam) barang bukti atas penggunaan frekuensi radio dan atau penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari:

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	Exciter Radio	46 Unit	Dihancurkan Menggunakan Road Roller (Stum)
2	Radio Komunikasi atau HT	3 Unit	Dihancurkan Menggunakan Road Roller (Stum)
3	STL Link	1 Unit	Dihancurkan Menggunakan Road Roller (Stum)
4	Penguat Signal	6 Unit	Dihancurkan Menggunakan Road Roller (Stum)
<b>Total</b>		<b>56 Unit</b>	

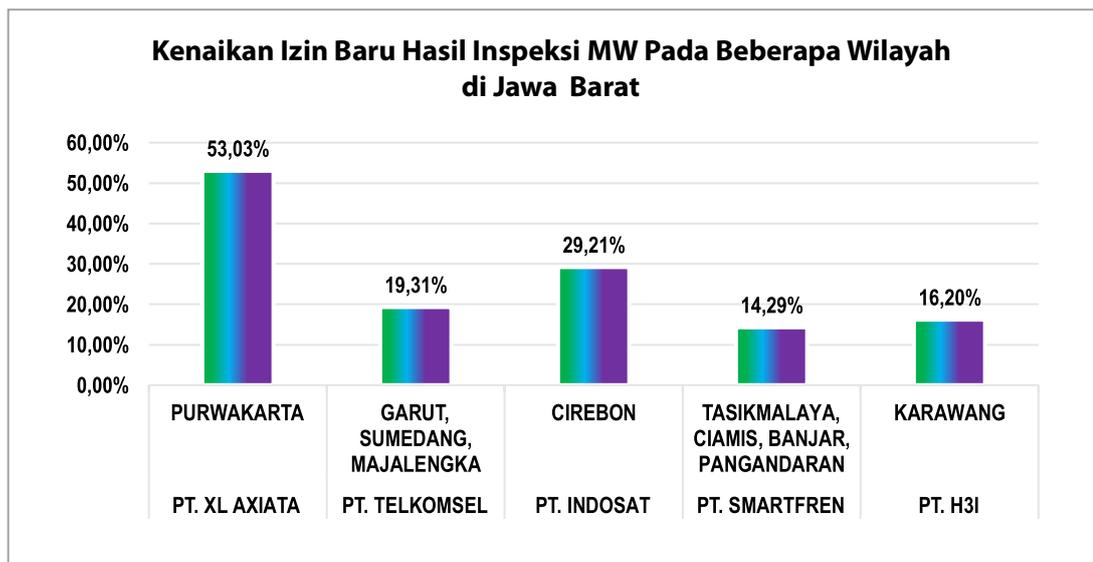
## 2. Kontribusi PNBK Ke Kas Negara Dari Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Data ISR 2019

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan Inspeksi dalam rangka validasi data ISR pada pengguna frekuensi microwave link di wilayah tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Hasil temuan penggunaan frekuensi MW yang belum ber-ISR, kemudian operator seluler melakukan pengurusan ISR baru atas pengurusan izin baru tersebut memberikan kontribusi ke kas negara sebesar Rp. 4.622.552.065,- (*Empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	OPERATOR	KAB/KOTA	ISR BARU HASIL INSPEKSI					
			SAMPLING INSPEKSI		SISA SAMPLING INSPEKSI		TOTAL	
			∑ ISR	JUMLAH BHP	∑ ISR	JUMLAH BHP	∑ ISR	JUMLAH BHP
1	PT. XL AXIATA	PURWAKARTA	126	Rp1,065,932,796	110	Rp654,073,583	236	Rp1,720,006,379
2	PT. TELKOMSEL	GARUT, SUMEDANG, MAJALENGKA	25	Rp164,260,243	48	Rp346,350,950	73	Rp510,611,193
3	PT. INDOSAT	CIREBON	72	Rp499,825,958	46	Rp333,326,042	118	Rp833,152,000
4	PT. SMARTFREN	TASIKMALAYA, CIAMIS, BANJAR, PANGANDARAN	38	Rp286,260,510	18	Rp152,860,786	56	Rp439,121,296
5	PT. H3I	KARAWANG	50	Rp392,428,996	78	Rp727,232,201	128	Rp1,119,661,197
<b>TOTAL ISR BARU</b>							<b>611</b>	<b>Rp4,622,552,065</b>

Sumber: Data Seksi PP (2019)

Dari hasil pelaksanaan inspeksi tersebut telah meningkatkan izin baru dari operator seluler yang telah dilakukan inspeksi dibanding dengan data izin existing, yaitu:



Sumber: Data Seksi PP (2019)

### 3. Survey Kepuasan Pelanggan

Tahun 2018 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO TUV Rheinland. Salah satu sasaran yang wajib dipenuhi adalah melakukan survey untuk menetapkan Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai komitmen Balmon Bandung dari Pencapaian Sasaran Mutu terhadap layanan yang diberikan 80% (sasaran mutu, standar pelayanan) atau lebih.

Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan spektrum frekuensi radio melalui penyebaran angket terhadap masing-masing jenis pelanggan ke beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat, adalah untuk mendapatkan model pengukuran kepuasan pelanggan, yang juga mencerminkan keberhasilan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya maupun manajemen spektrum frekuensi radio pada khususnya.

Kepuasan pelanggan khususnya pengguna spektrum frekuensi radio merupakan salah satu tujuan penetapan sistem manajemen mutu yang harus dipantau secara terus menerus. Evaluasi, pengukuran parameter tingkat kepuasan pelanggan serta upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pada setiap tahapan merupakan komitmen dan indikator keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dalam meningkatkan sistem mutu yang sesuai dengan komitmen ISO. Yang lebih penting adalah saling keterkaitan hubungan timbal balik yang harmonis dan menguntungkan antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dan pelanggan frekuensi radio khususnya di wilayah Jawa Barat dan dampak positif yang dihasilkan adalah peningkatan jumlah PNBPN dan meningkatnya jumlah pengguna frekuensi radio kedepannya. Diharapkan hasil dari Survey Kepuasan Pelanggan ini berhasil dan berdaya guna bagi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Total responden yang berhasil dihimpun yaitu sebanyak 103 klien dari berbagai wilayah di Bandung, Cirebon, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya. Hasil dari Survey Kepuasan Pelanggan sebagai berikut: **Indeks Kepuasan Pelanggan : 88.0971 %**

**Tabel Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2019**

No	Unsur Kepuasan Pelanggan	BDG	CRB	BDG	SBM	SMD	TSK	Rata-Rata
1	Aksesibilitas Kantor Pelayanan	4.38	4.17	4.24	3.89	4.29	4.47	4.24
2	Informasi Pelayanan	4.44	4.33	4.24	4.44	4.47	4.40	4.39
3	Jam Kerja Operasional	4.31	4.06	4.18	4.17	4.35	4.20	4.21
4	Kemudahan Mengajukan Permohonan Pelayanan	4.31	4.17	4.41	4.22	4.35	4.47	4.32
5	Performansi Aparat	4.56	4.61	4.53	4.17	4.65	4.67	4.53
6	Media Pelayanan	4.19	4.39	4.24	4.11	4.41	4.27	4.27
7	Performansi Kantor	4.31	4.39	4.29	4.06	4.35	4.33	4.29
8	Persyaratan/prosedur	4.38	4.39	4.29	4.06	4.41	4.47	4.33
9	Waktu	4.19	4.28	4.18	4.06	4.35	4.33	4.23
10	Peralatan dan Fasilitas yang Dimiliki	4.38	4.22	4.12	4.22	4.59	4.33	4.31

Nilai tingkat kepuasan pelanggan paling besar yaitu Performansi Aparat. Mencakup kepercayaan terhadap kecakapan, pengetahuan, petugas dalam melayani, cepat tanggapnya petugas, kemampuan aparat dalam menjawab pertanyaan, keramahan aparat dalam melayani dan ketepatan pemenuhan janji baik di kantor maupun di lapangan. Nilai tingkat kepuasan pelanggan paling kecil yaitu Jam Kerja Operasional. Jam kerja operasional kantor mengikuti ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Menpan dan RB, dengan petugas loket pelayanan yang siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan/masyarakat.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 program kerja yang disusun oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung memiliki komposisi anggaran dengan total sebesar Rp. 14.655.367.000,- (empat belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Total anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu: bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 7.634.645.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp. 7.020.722.000,- (tujuh miliar dua puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Pelaksanaan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2019 adalah terserap sebesar Rp. 14.116.618.414,- dari pagu Rp. 14.655.367.000,- atau sebesar 96.32%. Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sarasannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>SASARAN 1</b>			
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1,726,546,000.00	1,717,683,457.00	99.49%
<b>SASARAN 2</b>			
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	12,928,821,000.00	12,398,934,957.00	95.90%
<b>TOTAL</b>	<b>14,655,367,000.00</b>	<b>14,116,618,414.00</b>	<b>96.32%</b>

## Bab IV

# Penutup

**PADA** Tahun 2019 sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Bandung tahun 2019, telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 105.75%.

Seluruh Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan Kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi mampu mencapai target lebih dari 100% dan 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisiensi dan Efektif juga mampu menunjukkan kinerja sesuai target dengan capaian 100% dan Indikator Kinerja (IK) dari target IKPA score 94% capaian IKPA skore Balmon Bandung mencapai 92.97%, hal ini sangat dipengaruhi oleh data kontrak yang agak sedikit terlambat yang disebabkan Balmon Bandung harus melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara terpusat di Badan Layanan Pengadaan Kementerian Kominfo. Dalam hal penyerapan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dari Pagu Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 14.655.367.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.116.618.414,- atau 96.32%.

Dalam pelaksanaan program kerja, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung terdapat kendala yaitu adanya keterbatasan alat ukur frekuensi dan penunjangnya, hal ini tidak sebanding dengan kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja Balai

Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung dan tingginya tingkat gangguan frekuensi penerbangan yang dalam penanganannya tidak bisa ditunda karena merupakan resiko tinggi. Mengingat pengadaan perangkat monitoring frekuensi tidak bisa lagi diadakan di UPT, kami berharap Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung bisa menjadi prioritas dalam pengadaan perangkat monitoring frekuensi yang menjadi wewenang dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Laporan Kinerja ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung. Dengan demikian, laporan ini merupakan evaluasi kinerja dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan kegiatan, tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

